

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN



(0287) 551011

Jalan Kaleng No 16, Kemujan
Adimulyo, Kebumen



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adimulyo Tahun 2025 - 2029”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisis yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang kewilayahan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan urusan kewilayahan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang kewilayahan yang lebih baik di Kabupaten Kebumen. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Renstra Kecamatan Adimulyo, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

Camat Adimulyo
Kabupaten Kebumen



Drs. Budiono, M.Si.
Pembina Tk.I

NIP. 19691016 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... V

DAFTAR ISI VI

DAFTAR TABEL VII

DAFTAR GAMBARVIII

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ADIMULYO 7

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Adimulyo 7

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Adimulyo 9

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen..... 18

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo 28

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 34

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan..... 37

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 40

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 40

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya 41

2.2.3 Isu Strategis 48

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029 51

3.2 Strategi Kecamatan Adimulyo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 54

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Adimulyo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 54

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 56

4.1 Uraian Program dan Kegiatan 56

4.2 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 69

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 81

4.4 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan 86

BAB V PENUTUP..... 88

LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Adimulyo Tahun 2024..... 8

Tabel 2. 2 Kondisi Pegawai Kecamatan Adimulyo Tahun 2025..... 19

Tabel 2. 3 Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025..... 19

Tabel 2. 4 Komposisi SDM Kecamatan Adimulyo 2025 Menurut Jabatan ... 20

Tabel 2. 5 Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025..... 20

Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasar Golongan Tahun 2025. 21

Tabel 2. 7 Aset Tanah Kecamatan Adimulyo..... 23

Tabel 2. 8 Gedung dan Bangunan Permanen Kecamatan Adimulyo..... 23

Tabel 2. 9 Gedung dan Bangunan Pertemuan Permanen Kecamatan Adimulyo 24

Tabel 2. 10 Gedung dan Bangunan Kantor Permanen Kecamatan Adimulyo24

Tabel 2. 11 Gedung dan Bangunan Lain-lain Kecamatan Adimulyo 25

Tabel 2. 12 Gedung dan Bangunan Lain-lain Kecamatan Adimulyo 25

Tabel 2. 13 Sarana dan Prasarana Kecamatan Adimulyo..... 26

Tabel 2. 14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Adimulyo 2021-2026..... 32

Tabel 2. 15 Review Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo 2020-2025..... 33

Tabel 2.16 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2025..... 35

Tabel 2. 17 Kelompok Sasaran Kecamatan Adimulyo 38

Tabel 2. 18 Identifikasi Permasalahan 40

Tabel 2.19 Teknik Menyimpulkan Strategis Perangkat Daerah..... 49

Tabel 3. 1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Adimulyo dengan RPJMD 51

Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 53

Tabel 3. 3 Tahapan Strategi Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 2025-2029..... 54

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Adimulyo 55

Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Adimulyo 57

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo)..... 59

Tabel 4. 3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen..... 60

Tabel 4. 4 Rencana program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Adimulyo 2025 -2029 69

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 82

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama 86

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Adimulyo 7

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Adimulyo.....10

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Kecamatan Adimulyo.....50

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan maka Kecamatan Adimulyo wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan daerah secara berkelanjutan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan
 25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Adimulyo adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Adimulyo untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Adimulyo adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Adimulyo;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya wilayah Kecamatan Adimulyo yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Adimulyo, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Adimulyo.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Adimulyo yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan, target keberhasilan capaian dan target kinerja.

BAB V Penutup

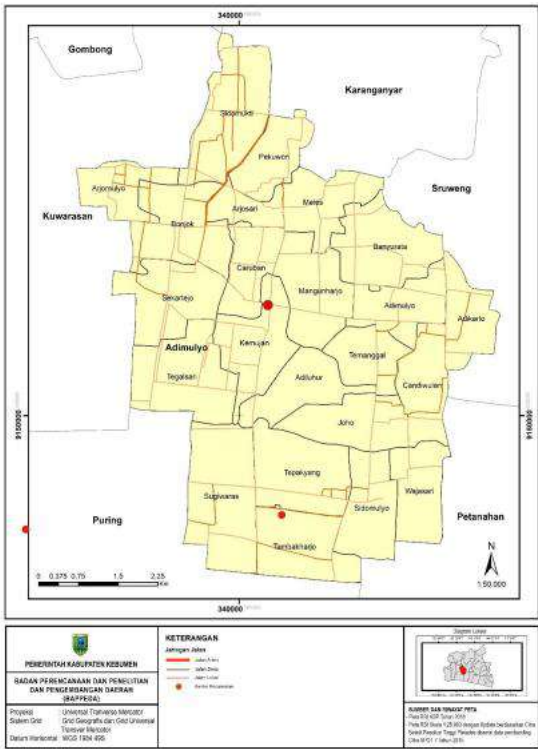
Berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN ADIMULYO

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Kecamatan Adimulyo merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang merupakan ibukota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Kecamatan Adimulyo memiliki luas 43,16 Ha. Lokasi Kecamatan Adimulyo berjarak ± 8 km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas – batas wilayah kecamatan Adimulyo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Gombong.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Petanahan.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombong.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring dan Kecamatan Petanahan.



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Adimulyo

Gambaran Penduduk di Kecamatan Adimulyo sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Adimulyo Tahun 2024

Desa	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Sugihwaras	961	889	1.850
Tambakharjo	948	907	1.855
Tepakyang	890	839	1.729
Sidomulyo	761	794	1.555
Wajasari	628	653	1.281
Candiwulan	996	1.029	2.025
Adikarto	1.005	1.022	2.027
Adimulyo	1.167	1.179	2.346
Temanggal	510	533	1.043
Joho	566	514	1.080
Adiluhur	892	829	1.721
Tegalsari	898	881	1.779
Sekarteja	570	548	1.118
Kemujan	693	713	1.406
Mangunharjo	719	743	1.462
Banyuroto	1.322	1.287	2.609
Meles	1.035	1.077	2.112
Caruban	955	993	1.948
Bonjok	698	688	1.386
Arjomulyo	863	850	1.713
Arjosari	534	522	1.056
Pekuwon	751	803	1.554
Sidomukti	1.298	1.389	2.687
Kecamatan Adimulyo	19.660	19.682	39.342

Sumber : Kecamatan Adimulyo dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Adimulyo memiliki penduduk sebanyak 39.342 jiwa terdiri dari laki-laki 19.660 jiwa (49.97 %) dan perempuan sebanyak 19.682 jiwa (50,03%) kondisi ini menggambarkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Adimulyo terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 27, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 26, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1, SMP/Sederajat sebanyak 4, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1. Sedangkan, fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Adimulyo terdapat 1 (satu) unit Puskesmas, 2 (dua) unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Apotek sebanyak 3 (tiga). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Adimulyo terdapat pasar modern

(minimarket/swalayan) sebanyak 12, pasar dengan bangunan permanen sebanyak 5, pasar dengan bangunan semi permanen 5, restoran /rumah makan sebanyak 1 serta kelompok pertokoan sebanyak 6.

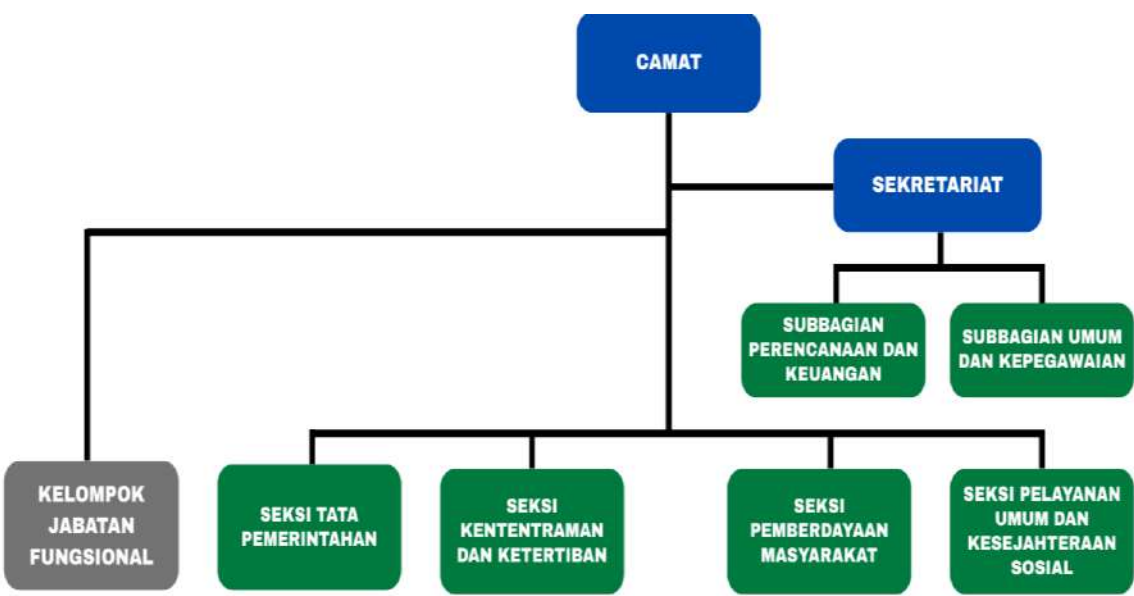
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Adimulyo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan, tugas pokok dari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan sebagian urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Adimulyo mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Adimulyo telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Adimulyo

Sumber: Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Adimulyo, Januari 2025

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat dijelaskan uraian tugas jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

a. Camat

Camat sebagai pimpinan di tingkat kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh sekretaris kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- 8) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 10) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 11) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 12) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 4) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya; pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 8) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 9) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 10) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 11) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- 12) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 13) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 2) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

- 6) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 7) peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 8) penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 9) penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 10) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- 11) penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- 5) peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 7) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- 11) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksana teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- 2) pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 3) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 4) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 5) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 6) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 7) koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 8) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 9) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- 10) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 11) penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kecamatan Adimulyo dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja kecamatan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Jumlah pegawai Kecamatan Adimulyo dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif karena terdapat beberapa pegawai yang purna tugas maupun mutasi ke instansi lain. Pada Tahun 2025 sebanyak 16 orang dengan adanya kekosongan pada jabatan kepala seksi pemberdayaan

masyarakat dan kepala seksi tata pemerintahan beserta stafnya. Kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Adimulyo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir didominasi oleh pegawai laki-laki, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kondisi Pegawai Kecamatan Adimulyo Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	13	13	10	10	9
Perempuan	4	6	4	5	7
Jumlah ASN	17	19	14	15	16

Sumber: Simpeg Kecamatan Adimulyo, Januari 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 16 orang tersebut terdapat 13 (empat belas) pegawai yang berstatus sebagai PNS dan terdapat 3 (tiga) pegawai yang berstatus sebagai PPPK. Adapun posisi pegawai berdasarkan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan		1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	3	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	4	1	5
5	Seksi Tata Pemerintahan	0	0	0
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	2
Jumlah		9	7	16
Persentase		56, 25%	43, 75%	100%

Sumber: Simpeg Kecamatan Adimulyo, 2025

Dilihat dari jenis kelamin pegawai Kecamatan Adimulyo Tahun 2025, jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Persentase laki-laki 56,25% dan perempuan 43,75 %. Meskipun persentase pegawai laki-laki masih mendominasi, keterwakilan perempuan yang mencapai 43,75% menunjukkan bahwa Kecamatan Adimulyo hampir mencapai titik keseimbangan gender.

Tabel 2. 4 Komposisi SDM Kecamatan Adimulyo 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III/a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV/b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV/a	0
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV/a	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	0
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV/a	1
9.	Pengadministrasi Umum	-	5
10.	Verifikator Keuangan	-	1
11.	Perencana Ahli Pertama	-	1
12.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	1
13.	Arsiparis Terampil	-	1
14.	Pengadministrasi Perkantoran	-	1
Jumlah			16

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas terdapat 2 (dua) orang pegawai yang menempati posisi eselon IV/b, 1 (satu) orang pegawai menempati eselon IV/a, 1 (satu) orang menempati posisi eselon III/b, 1 (satu) orang menempati posisi eselon III/a, terdapat 3 (tiga) orang pegawai fungsional, serta 6 (enam) orang pegawai menempati jabatan pelaksana. Ketercukupan pegawai di suatu instansi pemerintah didasarkan atas kebutuhan sesuai dengan formasi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berlaku. Hal ini karena di Kecamatan Adimulyo masih adanya kekosongan pada jabatan kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan kepala seksi tata pemerintahan beserta stafnya. Adanya kekosongan pada jabatan struktural tersebut dapat berdampak pada kinerja Kecamatan Adimulyo.

Tabel 2. 5 Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Camat	1						1
2	Sekretaris Kecamatan		1					1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		3	1				4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1	1	3			5

5	Seksi Tata Pemerintahan							0
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban		1					1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1		1			2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1			1			2
Jumlah		2	7	2	5	0	0	16
Persentase		12,5%	43,75%	12,5%	31,25%	0,0%	0,0%	100%

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

Berdasar Tabel 2.4. dapat dilihat mayoritas pegawai Kecamatan Adimulyo berpendidikan S1 (7 orang) dan S2 (2 orang), tetapi masih terdapat beberapa pegawai yang berpendidikan SLTA. Dilihat dari Pendidikan yang ditamatkan, pegawai Kecamatan Adimulyo mempunyai kualitas yang tinggi dimana 56,25% pegawai mengenyam berpendidikan tinggi.

Tabel 2. 6 Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol V/VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Kecamatan				1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		1	3		4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	2	1		5
5	Seksi Tata Pemerintahan					0
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban			1		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1		2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1		1	2
Jumlah		3	4	6	3	16
Persentase		18,75%	25%	37.5%	18,75%	100%

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

Dilihat dari golongan/ruang pegawai Kecamatan Adimulyo, yang menduduki golongan III sebanyak 6 orang, golongan IV sebanyak 3 orang, dan golongan II berjumlah 4 orang. Untuk golongan 5 sebanyak 1 orang, golongan 7 sebanyak 1 orang dan golongan 9 sebanyak 1 orang. Terdapat sebanyak 16 orang yang bersatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Kecamatan Adimulyo.

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Adimulyo. Sarana dan prasarana yang

berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Aset Tanah Kecamatan Adimulyo

No	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000001	1.596,00	1956	Jln. Kaleng Nomor 16 Desa Kemujan	Hak Pakai	7/25/1991	2	Kantor Kecamatan	Pembelian	43.092,00	Sebidang Tanah
Jumlah Harga												43.092,00	

Sumber: Kartu Inventaris Barang A SIMDA BMD Kabupaten Kebumen, 31 Desember 2024

Tabel 2. 8 Gedung dan Bangunan Permanen Kecamatan Adimulyo

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingk at / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.001.001	000001	Baik	Tidak	Tidak	116	Jln. Kaleng No. 16 Desa Kemujan Kec. Adimulyo				Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	58.580,00	Bangunan R.Pelayanan dan R.Rapat Kec. Adimulyo
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.01.001.008.001	000001	Baik	Tidak	Tidak	28	Jln. Kaleng No. 16 Desa Kemujan Kec. Adimulyo				Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	14.140,00	Bangunan Mushola dan WC
Jumlah Harga															72.720,00	

Sumber: Kartu Inventaris Barang C SIMDA BMD Kabupaten Kebumen, 31 Desember 2024

Tabel 2. 9 Gedung dan Bangunan Pertemuan Permanen Kecamatan Adimulyo

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.01.001.009.001	000001	Kurang Baik	Tidak	Tidak	263	Desa Kemujan Kec. Adimulyo				Tanah Hak Lainnya	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	132.815,00	Gedung BP. LKMD Adimulyo (Tanah Milik Pemdes Kemujan)
Jumlah Harga															132.815,00	

Sumber : Kartu Inventaris Barang C SIMDA BMD Kabupaten Kebumen, 31 Desember 2024

Tabel 2. 10 Gedung dan Bangunan Kantor Permanen Kecamatan Adimulyo

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.001.01.001	000002	Baik	Tidak	Tidak	184	Jln. Kaleng No. 16 Desa Kemujan Kec. Adimulyo	19/09/2001			Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	89.196,00	Bangunan Gedung Kantor dan Dapur Kec. Adimulyo
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.001.01.005	000001	Baik	Tidak	Tidak	30	Jln. Kaleng No. 16 Desa Kemujan Kec. Adimulyo				Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	15.150,00	Bangunan Pagar Kantor
3	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1.3.3.01.002.03.007	000001	Baik	Tidak	Tidak	70	Jln. Kaleng No. 16 Desa Kemujan Kec. Adimulyo				Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	35.350,00	Bangunan Gedung Rumah Dinas Camat
Jumlah Harga															139.696,00	

Sumber: Kartu Inventaris Barang C SIMDA BMD Kabupaten Kebumen, 31 Desember 2024

Tabel 2. 11 Gedung dan Bangunan Lain-lain Kecamatan Adimulyo

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.001.01.005	000002	Kurang Baik	Tidak	Beton	54	Jln. Kaleng No. 16 Desa Kemujan Kec.Adimulyo				Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	10.000,00	Tempat Parkir
Jumlah Harga															10.000,00	

Sumber: Kartu Inventaris Barang C SIMDA BMD Kabupaten Kebumen, 31 Desember 2024

Tabel 2. 12 Gedung dan Bangunan Lain-lain Kecamatan Adimulyo

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1.3.3.01.001.014.002	000001	Baik	Tidak	Beton	18	Jln. Kaleng No. 16 Desa Kemujan Kec. Adimulyo				Tanah Milik Pemda	01 . 01 . 01 . 04 . 001. 0001	Pembelian	4.050,00	Bangunan Gedung Tempat Parkir
Jumlah Harga															4.050,00	

Sumber: Kartu Inventaris Barang C SIMDA BMD Kabupaten Kebumen, 31 Desember 2024

Tabel 2. 13 Sarana dan Prasarana Kecamatan Adimulyo

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	A.C. <i>Split</i>	8	7		1		8	
2	Alat Kantor Lainnya	1			1		1	
3	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	3			1	3	
4	Alat Pemadam/ <i>Portable</i>	1	1				1	3
5	Alat Rumah Tangga Lain-lain	13	12		1		13	
6	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Tangga Lipat)	1	1				1	
7	<i>Buffet</i> Kayu	1	1				1	
8	Camera Film	1	1				1	
9	CCTV - <i>Camera Control Television System</i>					1		
10	Gergaji <i>Chain Saw</i>					1		
11	Dispenser	1	1				1	
12	<i>Filing Cabinet</i> Besi	12	12				12	
13	Jam Mekanis	1	1				1	
14	Kipas Angin	10	10				10	
15	Kursi Biasa	3	3				3	
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13	13				13	
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	2		2		4	
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	7		5		12	
19	Kursi Kerja					2		
20	Kursi Lipat	34	34				34	
21	Kursi Rapat Ruangan Data	120	116		4		120	
22	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	33	33				33	
23	Kursi Tamu	2	2				2	
24	Laptop	13	9		4		13	4
25	Layar Film/ <i>Projector</i>	1			1		1	2
26	Lemari Besi/Metal	8	6		2		8	
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2				2	
28	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis					1		6
29	Lemari Kaca	7	5		2		7	
30	Lemari Kayu	2	2				2	
31	<i>Loudspeaker</i>	1	1				1	
32	Meja Kerja Kayu	2	2			1	2	
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17	9		8		17	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2				2	

35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8				8	
36	Meja Komputer	2	2				2	
37	Meja Podium	1	1				1	
38	Meja Rapat	20	20				20	
39	Meja Rapat Pejabat lainnya	2	2				2	
40	Meja Telepon	1	1				1	
41	Mesin Ketik <i>Manual Standard</i> (14-16 Inchi)	1	1				1	
42	P.C Unit	1	1				1	
43	Papan Pengumuman	1	1				1	
44	Papan Tulis	1			1		1	
45	Papan Visual/Papan Nama	2	1		1		2	
46	Peta	1	1				1	
47	<i>Portable Generating Set</i>	1			1		1	
48	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	10	5	1	4		10	5
49	Rak Kayu	4	4				4	
50	<i>Sice</i>	3	3				3	
51	<i>Sound System</i>	3	3				3	
52	Tabung Gas	1	1				1	
53	Televisi	2	2				2	
54	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1				1	
55	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1	1				1	
56	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	1		1		2	
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2				2	
58	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1			1		1	
59	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1				1	
60	Gedung Garasi/ <i>Pool</i> Semi Permanen	1	1				1	
61	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1				1	
62	<i>Station Wagon</i>	1	1				1	
63	Sepeda Motor	35	35				35	
TOTAL		440	399	1	40	7	440	20

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada sebagaimana tabel di atas. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Kecamatan Adimulyo di samping perlu dilakukan pemeliharaan sarana prasarana yang dimiliki, juga masih membutuhkan beberapa kelengkapan, antara lain :

- a. Kebutuhan pemenuhan teknologi berupa LCD proyektor dan printer dalam menunjang pelaksanaan tugas di Kecamatan Adimulyo.
- b. Pemenuhan standar pelayanan berupa perkakas kerja (kursi tunggu di area pelayanan administrasi kependudukan)
- c. Pemenuhan tata laksana perkantoran (pemeliharaan gedung)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Adimulyo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
- 4) Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Adimulyo dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kecamatan Adimulyo selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Adimulyo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga penyediaan alat tulis kantor setiap tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Adimulyo setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Adimulyo setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Adimulyo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi belum mencukupi.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Adimulyo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja

aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.

3) Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo dibidang Pemerintahan tercermin dari:

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4) Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran bantuan Sembako, dan program-program sosial lainnya;
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- e. Pembinaan anggota Linmas Desa di kecamatan Adimulyo;
- f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan Utama PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab.

Pada bagian ini disajikan pencapaian kinerja Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2021 – 2026 berdasarkan bidang urusan, terbagi menjadi capaian kinerja urusan kewilayahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Adimulyo 2021-2026

NO	Indikator Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						KET
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,33	62,81	70,91	85,74	NA	NA	100,35	102,41	111,97	131,24	-	-	
	Indikator Sasaran																							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Indeks	84	85	86	87	88	89	86,2	87,69	87,69	87	88	-	102,6	105,65	101,96	100	100	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Adimulyo	-	-	-	Indeks	91	91	91	92	92	92	91,97	95,14	90,81	91,01	92,02	-	101,06	104,55	99,9	98,9	100,02	-	

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

Berdasarkan data dari tabel di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Adimulyo sebagian besar sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada renstra periode sebelumnya. Persentase realisasi capaian kinerja pelayanan publik berada pada sekitar 98%-100%. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya agar pelayanan yang diberikan Kecamatan Adimulyo semakin baik dan berorientasi pelayanan prima.

Tabel 2. 15 Review Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kecamatan Adimulyo Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-	91,97	91	91	92	92	-	84,26	87,85	90,81	91,01	92,02	-	91,62	96,54	99,9	98,9	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusifitas Kecamatan Adimulyo	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100.	100	-	100	100	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	-	NA	24,05	34,04	38,08	46,01	-	13,04	47,83	73,91	91,30	91,30	-	-	198,88	217,14	239,76	198,44

Berdasarkan Tabel 2.15 menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo pada periode Tahun 2021-2025 sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dari keempat program tersebut terdapat program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yakni program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Meskipun capaiannya belum 100%, tetapi capaiannya masih tergolong baik sehingga perlu perhatian agar ke depannya setiap program yang dijalankan Kecamatan Adimulyo dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Karena hal ini nantinya dapat berdampak pada kinerja Kecamatan Adimulyo. Untuk data pada Tahun 2025 pada tabel tersebut merupakan data tahun berjalan sehingga data yang ditampilkan bukan merupakan data lengkap selama 1 tahun.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Adimulyo dan mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan di Kecamatan Adimulyo. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Adimulyo.

Tabel 2.16 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2025

No.	Program/Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025 (Triwulan III)			Rata - rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggara n Perubah an (%)	Realisa si (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.375.127.000	2.009.990.082	84,63	2.240.147.000	2.130.690.118	95,11	2.194.565.000	2.060.314.833	93,88	2.256.230.000	2.158.220.742	95,66	2.336.200.000	1.539.253.796	65,89	0,34	-5,30
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.800.000	9.799.000	99,98	10.000.000	9.998.600	99,99	8.256.000	8.248.400	99,91	11.810.000	11.808.928	99,99	13.310.000	11.701.000	87,91	10,09	6,70
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.153.753.000	1.792.990.186	83,25	2.067.310.000	1.973.222.668	95,45	2.047.281.000	1.915.782.190	93,58	2.057.631.000	1.960.819.894	95,3	2.137.417.000	1.375.300.298	64,34	-0,15	-5,09
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.500.000	43.435.200	99,85	75.087.000	72.546.000	96,62	38.566.000	38.413.600	99,6	58.855.000	58.753.500	99,83	48.500.000	42.288.385	87,19	14,75	11,22
	Pengadaan Barang Milik Daerah	98.574.000	97.778.000	99,19	10.000.000	9.988.400	99,88	16.000.000	15.889.200	93,31	8.000.000	7.860.000	98,25	8.000.000	7.768.000	97,1	-19,96	-20,60
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.500.000	30.367.751	96,41	36.000.000	31.125.118	86,46	35.462.000	33.095.443	93,33	41.374.000	41.028.372	99,16	55.742.000	37.341.513	66,99	16,04	5,95
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000	35.619.945	93,74	41.750.000	33.809.332	80,98	49.000.000	48.886.000	99,77	78.560.000	77.950.048	99,22	73.231.000	64.854.600	88,56	30,19	20,54
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.440.000	41.636.200	85,95	51.000.000	47.957.089	94,03	46.310.000	46.106.400	99,56	1.318.399.000	1.289.015.956	97,77	14.854.000	12.178.500	81,99	661,02	652,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	48.440.000	41.636.200	85,95	51.000.000	47.957.089	94,03	46.310.000	46.106.400	99,56	1.318.399.000	1.289.015.956	97,77	14.854.000	12.178.500	81,99	661,02	652,00

No.	Program/Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025 (Triwulan III)			Rata - rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capai an Kinerj a (%)	Anggara n Perubah an (%)	Realisa si (%)
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.817.000	40.310.335	96,40	20.000.000	19.999.300	99,99	20.000.000	19.999.200	99,99	23.039.000	23.038.900	99,99	19.233.000	19.225.000	99,96	-13,37	-11,73
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.817.000	40.310.335	96,40	20.000.000	19.999.300	99,99	20.000.000	19.999.200	99,99	23.039.000	23.038.900	99,99	21.847.000	19.225.000	99,96	-13,37	-11,73
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	107.225.000	106.679.000	99,49	126.500.000	125.078.800	98,8	248.721.000	246.614.900	99,15	150.221.000	150.099.487	99,92	128.460.000	85.875.900	66,85	15,13	8,12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.225.000	106.679.000	99,49	126.500.000	125.078.800	98,8	248.721.000	246.614.900	99,15	150.221.000	150.099.487	99,92	128.460.000	85.875.900	66,85	15,13	8,12
JUMLAH		2.572.609.000	2.198.615.617	85,46	2.437.647.000	2.323.725.307	95,33	2.509.596.000	2.373.035.333	94,56	3.747.889.000	3.620.375.085	96,60	2.498.747.000	1.656.533.196	66,29	3,42	1,53

Berdasarkan Tabel 2.16, kinerja keuangan Kecamatan Adimulyo pada Tahun 2021-2025 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dilihat dari capaian realisasi yang cukup baik yaitu pada kisaran 80%-99%. Pertumbuhan anggaran rata-rata sekitar 3,42% per tahun. Sedangkan, pertumbuhan realisasi rata-rata sekitar 1,53% per tahun. Pada Tahun 2025 data yang ditampilkan merupakan data berjalan sampai dengan Triwulan III. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan Kecamatan Adimulyo yang efisien dan akuntabel. Namun demikian, diperlukan langkah optimalisasi dalam perencanaan serta penyerapan anggaran agar pelaksanaan program ke depan dapat lebih tepat sasaran.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pelayanan prima Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen menetapkan kelompok sasaran. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh kecamatan tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Kecamatan Adimulyo pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Kelompok Sasaran Kecamatan Adimulyo

No	Sasaran Layanan	Jenis Layanan	Keterangan
1.	Masyarakat Umum	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) terutama untuk pelayanan non perizinan seperti : - Pembuatan Kartu Tanda Penduduk - Pembuatan Kartu Keluarga - Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia Antar Kecamatan - Penerbitan Surat Dispensasi Nikah - Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran - Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian - Penerbitan Surat Keterangan Kuliah Kerja Nyata, survei dan penelitian - Pemberian Legalisasi Pengajuan Pindah Penduduk Keluar Daerah - Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris - Pemberian Legalisasi Proposal - Pemberian Legalisasi Surat Keterangan / Pengantar	Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Adimulyo tidak hanya melayani pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Adimulyo saja tetapi juga masyarakat kecamatan lain.
2.	Kelompok Rentan (masyarakat miskin, wanita hamil, lansia, serta penyandang disabilitas)	– Pelayanan bantuan sosial berupa pendataan, fasilitasi, dan rekomendasi bantuan sosial – Pelayanan inklusif dengan fasilitasi akses layanan publik dan pendampingan administrasi	Masih terdapat kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan pendampingan.
3.	Pemerintahan Desa	Pelayanan koordinatif dan fasilitasi administrasi serta bimbingan teknis dari pihak kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa.	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan evaluasi APBDes. Pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan evaluasi rancangan APBDes.

No	Sasaran Layanan	Jenis Layanan	Keterangan
4.	Kelompok Pemuda	Program penguatan dan pembinaan organisasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan Desa maupun Kecamatan.	Fasilitasi kegiatan kepemudaan, pengembangan bakat olahraga/seni, dan pelatihan kewirausahaan muda.
5.	Kelompok Perempuan dan Anak	Pelayanan perlindungan ibu beserta anak dan pemberdayaan terhadap Perempuan (PKK dan Posyandu)	Program kesehatan ibu dan anak, pencegahan <i>stunting</i> , serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui PKK.
6.	Pelaku Ekonomi Lokal	Fasilitasi berupa promosi potensi lokal, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.	Pembinaan bagi pengrajin lokal, dan komunitas ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing produk Kecamatan Adimulyo.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Adimulyo.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Adimulyo diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Adimulyo telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Adimulyo.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Adimulyo dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen menghadapi permasalahan yang nantinya akan diidentifikasi dan dicarikan solusinya. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Adimulyo sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Identifikasi Permasalahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)	Kemampuan SDM yang belum optimal
		Kurangnya jumlah SDM
		Belum optimalnya pola kerja
	Kurang optimalnya sarana pendukung yang tersedia	Kondisi sarana dan prasarana yang kondisinya kurang baik
		Kondisi jaringan internet yang kurang stabil
Belum optimalnya pengembangan potensi	Kurangnya kapasitas SDM	Kurangnya kemampuan pengelolaan potensi dan promosi
		Kurangnya koordinasi antar <i>stakeholder</i>
Belum optimalnya mitigasi bencana	Minimnya data risiko yang akurat dan <i>ter-update</i>	Belum adanya identifikasi risiko bencana

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
banjir untuk lokasi rawan banjir	Kurangnya partisipasi masyarakat	Minimnya keterlibatan komunitas dalam kesiapsiagaan banjir
		Kurangnya kesadaran masyarakat terkait mitigasi
Belum optimalnya pengembangan inovasi di kecamatan	Kurang optimalnya pengembangan SDM	Budaya inovasi yang belum terbentuk
		Kurangnya pelatihan dan pengembangan

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT yang merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT yang memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi permukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Permukiman, Kecamatan Adimulyo masuk dalam pusat kegiatan lokal berupa Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar. Renstra Kecamatan Adimulyo diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah dalam meningkatkan dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal.

d. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kebumen

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Adimulyo, yaitu:

1. Adanya ancaman bencana banjir karena lokasi wilayah Kecamatan Adimulyo yang dilintasi beberapa sungai.
2. Adanya risiko bencana kekeringan di Kecamatan Adimulyo.

Berdasarkan hasil telaah di atas maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Adimulyo meliputi:

1. Penanaman vegetasi di area sungai terutama pada lokasi yang rawan banjir.
2. Mitigasi terhadap perubahan iklim dan mengedukasi masyarakat terkait kerentanan bencana.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi Kabupaten Kebumen menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kebumen baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan Pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi* dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kabupaten Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah

yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kabupaten Kebumen.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan visi Kabupaten Kebumen terdapat 5 (lima) misi Pembangunan daerah yaitu sebagai berikut.

1) **Misi 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak**

Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas serta inklusi sosial.

2) **Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kabupaten Kebumen Sejahtera dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian. Dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

3) **Misi 3 : Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4) **Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni, ngayomi dan ngayemi*.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen maju. Dengan agenda yang hendak diwujudkan yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis *digital*/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5) **Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, *guyub*, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang *guyub*, rukun, damai, tertib serta aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Adimulyo mendukung misi Bupati Kebumen yang keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni, ngayomi, dan ngayemi* melalui meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis IT. Untuk mendukung pelaksanaan misi keempat tersebut Kecamatan Adimulyo melalui hal-hal berikut.

1) Penguatan Praktik *Good Governance*

Kecamatan Adimulyo dalam menyelenggarakan pelayanan senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* seperti

transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan efisiensi.

2) Mendorong Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*)

Menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan berjalan jujur, berintegritas, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penguatan integritas aparatur dan transparansi.

3) Mewujudkan Pemerintahan yang *Ngopeni*

Menghadirkan pemerintah yang benar-benar memperhatikan, melayani, dan merawat kebutuhan masyarakat dengan pendekatan humanis terutama terhadap masyarakat kelompok rentan.

4) Mewujudkan Pemerintahan yang *Ngayomi*

Berperan untuk mengayomi dengan memastikan setiap warga negara terlindungi hak-haknya dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Rasa aman juga dibangun melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pelayanan publik yang adil dan tidak memihak.

5) Mewujudkan Pemerintahan yang *Ngayemi*

Menyelenggarakan suasana kerja pemerintahan yang beretika, ramah, dan penuh empati turut menciptakan rasa tenang di tengah masyarakat.

Berikut adalah peranan Kecamatan Adimulyo yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1) **ASN Nyaman, Terampil, Inovatif**

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui merit sistem menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

2) **Desa Berdaya**

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi penguatan ekonomi desa, penguatan tata kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3) ***Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun***

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadayaan, gotong royong dan *guyub* rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: *merdi deso*, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Adimulyo maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan, sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatkan kualitas tata kelola Kecamatan Adimulyo.

2.2.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, Renstra Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kebumen dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Teknik Menyimpulkan Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Belum optimalnya mitigasi bencana banjir untuk lokasi rawan banjir • Belum optimalnya pengembangan inovasi di kecamatan	• Tata kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah • Peningkatan SDM untuk untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Optimalisasi pengembangan potensi wilayah • Peningkatan edukasi terhadap mitigasi bencana di wilayah rawan banjir • Peningkatan pengembangan inovasi di kecamatan

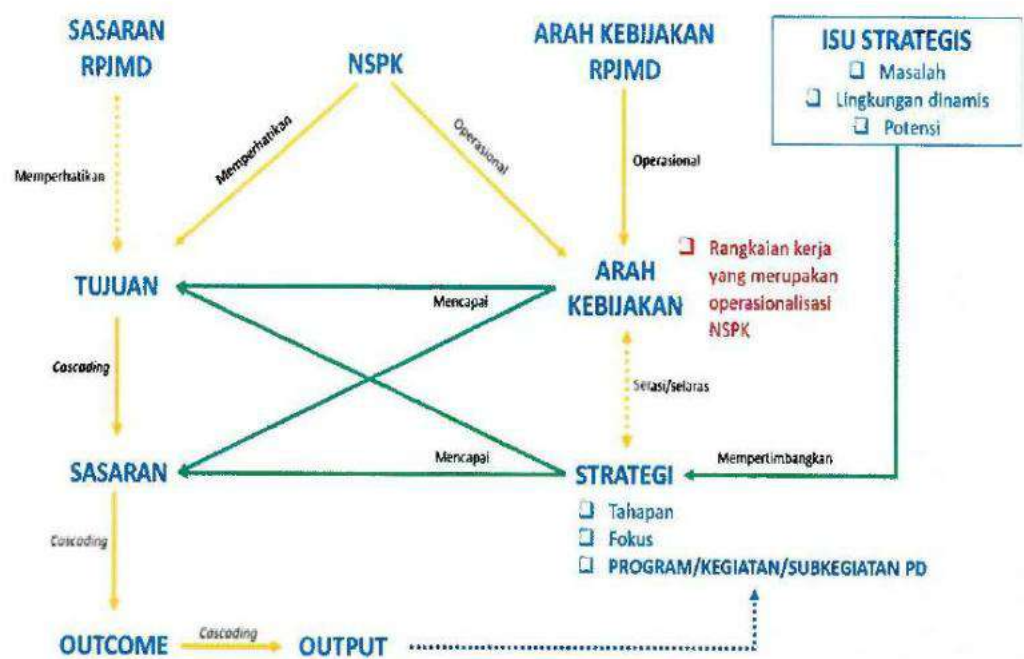
Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode Tahun 2025-2029 visi dan misi Kecamatan Adimulyo sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Adimulyo.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan Renja PD). Secara skematik, keterkaitan antara RPJMD dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo, adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Konsep Renstra Kecamatan Adimulyo

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan. Tujuan dan

sasaran renstra telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Adapun hubungan kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Adimulyo dengan RPJMD

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra	Urusan Pemerintahan Bidang
Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Adimulyo	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Adimulyo	Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Adimulyo	Indeks Tata Kelola Kecamatan Adimulyo	Kewilayahan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Adimulyo sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala daerah dalam menca pai visi dan misi bidang peningkatan tata kelola pemerintahan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Adimulyo. Adapun tujuan Kecamatan Adimulyo untuk periode 2025-2029 yaitu **meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Adimulyo**.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen maka perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih. Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, dimana Kecamatan Adimulyo mempunyai tugas membantu Bupati dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Adimulyo maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029 yaitu **meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Adimulyo**.

Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Adimulyo.		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Adimulyo	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Adimulyo	Indeks Tata Kelola Kecamatan Adimulyo	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Adimulyo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Renstra diperlukan strategi. Strategi sebagai langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Adimulyo adalah **peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik**. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Adimulyo dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Tahapan Strategi Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 2025-2029

Tahapan I (2026)	Tahapan II (2027)	Tahapan III (2028)	Tahapan IV (2029)	Tahapan V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Adimulyo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Arah kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian langkah strategis dan sistematis yang disusun sebagai operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin

keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah. Dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap dinamika pembangunan, arah kebijakan ini menjadi pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Adimulyo

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi.	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan <i>stakeholder</i> untuk mendukung tata kelola kecamatan.	

BAB IV

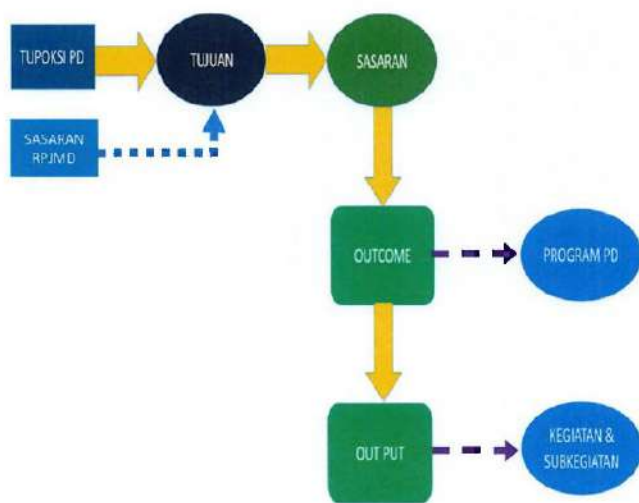
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Adimulyo untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Kecamatan Adimulyo dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Adimulyo. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Adimulyo dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Adimulyo

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 5. Penyediaan Bahan/Material; 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2. Pemeliharaan Mebel; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
B Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan; 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
C Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo)

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				2.655.013.122,00		2.731.243.085,00		2.823.227.407,00		2.929.066.588,0		3.002.884.194,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.489.574.122,00		2.557.902.085,00		2.649.386.407,00		2.748.649.588,00		2.821.484.194,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo)	71,85	71,90	2.489.574.122,00	72,00	2.557.902.085,00	72,51	2.649.386.407,00	73,76	2.748.649.588,00	75,00	2.821.484.194,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN ADIMULYO
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00	
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)	100,00	100,00	11.000.000,00	100,00	11.500.000,00	100,00	12.000.000,00	100,00	12.500.000,00	100,00	13.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN ADIMULYO
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				23.039.000,00		24.191.000,00		24.191.000,00		24.917.000,00		25.400.000,00	
Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)	100,00	100,00	23.039.000,00	100,00	24.191.000,00	100,00	24.191.000,00	100,00	24.917.000,00	100,00	25.400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN ADIMULYO
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				131.400.000,00		137.650.000,00		137.650.000,00		143.000.000,00		143.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan Adimulyo)	100,00	100,00	131.400.000,00	100,00	137.650.000,00	100,00	137.650.000,00	100,00	143.000.000,00	100,00	143.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.00 00 - KECAMATAN ADIMULYO

Tabel 4. 3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Adimulyo						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Adimulyo					
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo)	Program Urusan Daerah Penunjang Pemerintah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya bahan / material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya penanganan pengaduan di Kecamatan Adimulyo		Persentase Penanganan Pengaduan di Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	
				Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
				Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pestaarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan Adimulyo yang melaksanakan		Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai dengan Ketentuan (Kecamatan Adimulyo)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
			APBDes sesuai dengan ketentuan				
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

**4.2 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu
Indikatif**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka setiap kegiatan yang telah dirancang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, akuntabel dan searah dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Setiap sub kegiatan dilengkapi uraian kinerja yang menggambarkan bagaimana kontribusi terhadap pencapaian hasil kegiatan dilengkapi dengan uraian kinerja yang menggambarkan kontribusinya terhadap pencapaian hasil kegiatan, indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, target tahunan sebagai tolok ukur capaian serta pagu indikatif sebagai estimasi kebutuhan anggaran selama lima tahun.

Dengan adanya penyusunan uraian sub kegiatan secara lengkap dan terukur diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal, transparan dan dapat memberikan *impact* kepada masyarakat. Hal ini juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang efektif.

Lebih lanjut uraian program, sub kegiatan beserta rencana pendanaan akan dijelaskan pada tabel tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4 Rencana program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Adimulyo 2025-2029

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.655.013.122		2.731.243.08		2.823.227.407		2.929.066.588		3.002.884.194		
7.01	KECAMATAN			2.655.013.122		2.731.243.08		2.823.227.407		2.929.066.588		3.002.884.194		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				2.489.574.122		2.557.902.085		2.649.386.407		2.748.649.588		2.821.484.194	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan:Nilai)	71,85	71,90		72,00		72,51		73,76		75,00		SEKRETARIS CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan satuan : dokumen)	24	14		14		14		17		14		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dengan satuan : dokumen)	11	6		6		6		8		6		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan satuan : laporan)	13	8		8		8		9		8		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.276.949.276		2.342.807.755		2.342.807.755		2.527.263.296		2.596.053.210	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan : Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.261.949.276		2.329.807.755		2.419.433.086		2.513.263.296		2.581.553.210	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Dengan Satuan : Orang / bulan)	17	17		17		17		17		17		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000		14.500.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dengan satuan : dokumen)	13	8		8		8		8		8		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				30.673.389		30.656.850		34.308.63		37.291.532		37.661.082	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan : Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				2.200.000		2.200.000		2.500.000		3.500.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Dengan satuan : paket)	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.400.000		14.400.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Dengan satuan : paket)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.507.389		1.490.850		1.608.639		1.791.532		1.661.082	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Dengan satuan : paket)	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.440.000		1.440.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Dengan satuan : dokumen)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				4.800.000		4.800.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan (Dengan satuan : paket)	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.200.000		3.200.000		3.600.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Dengan satuan : laporan)	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.126.000		3.126.000		3.200.000		3.600.000		3.600.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dengan satuan :	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.600.000		38.600.000		39.000.000		40.000.000			
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah (Dengan satuan : unit)	9	6		6		6		6		6	40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.600.000		38.600.000		39.000.000		40.000.000		40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Dengan satuan : unit)	4	6		6		6		6		6		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.916.457		75.662.480		77.668.682		78.974.760		79.649.902	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa Penunjang pemerintahan daerah (Dengan satuan : bulan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Dengan satuan : laporan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				21.820.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		24.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Dengan satuan : laporan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				49.596.457		52.012.480		53.018.682		53.324.760		53.999.902	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Dengan satuan : laporan)	12	12		12		12		12		12	53.999.902	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.435.000		57.175.000		51.976.000		52.120.000		55.120.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan satuan : unit)	28	40	57.435.000	28		38		28		38		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.435.000		35.675.000		36.976.000		38.000.000		40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	14	14		14		14		14		14		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Operasional atau Lapangan	perizinannya (Dengan satuan : unit)												
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Mebel				2.000.000		0		1.000.000		0		1.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Dengan satuan : unit)	0	12		0		10		0		10		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		8.500.000		4.000.000		4.120.000		4.120.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Dengan satuan : unit)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000		13.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Dengan satuan : unit)	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.000.000		13.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan : Persen)	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.000.000		13.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan satuan : persen)	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan				11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan (Dengan satuan : laporan)	9	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (Dengan satuan : laporan)	0	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				23.039.000		24.191.000		24.191.000		24.917.000		25.400.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan : Persen)	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				23.039.000		24.191.000		24.191.000		24.917.000		25.400.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				23.039.000		24.191.000		24.191.000		24.917.000		25.400.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan satuan : orang)	50	50		50	24.191.000	50	24.191.000	50	24.917.000	50	25.400.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM DAN PENGAWASAN				131.400.000		137.650.000		137.650.000		143.000.000		143.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	PEMERINTAHAN DESA													
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan : Persen)	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				131.400.000		137.650.000		137.650.000		143.000.000		143.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Dengan satuan : persen)	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				30.000.000		30.000.000		31.500.000		32.500.000		32.500.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (dengan satuan : dokumen)	12	5		5		5		5		5		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		6.250.000		0		0		0	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa (dengan satuan: dokumen)	0	0		21		0		0		0		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12.700.000		12.700.000		13.300.000		14.000.000		14.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (dokumen)	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				13.000.000		13.000.000		13.650.00		14.500.000		14.500.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (dokumen)	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				30.500.000		30.500.000		32.000.000		33.000.000		33.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif (dokumen)	4	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				35.000.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000		37.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (dokumen)	4	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM/ OUTCOM E / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETER5NGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10.200.000		10.200.000		11.200.000		12.000.000		12.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (laporan)	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL	2.655.013.122		2.731.243.085		2.823.227.407		2.929.066.588		3.002.884.194		

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah yang ditetapkan berdasarkan isu strategis sasaran utama RPJMD Kabupaten Kebumen dan kemampuan pendanaan daerah. Adapun daftar yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Adimulyo				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah (Kecamatan Adimulyo)	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan / Material	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kondusivitas kecamatan (Kecamatan Adimulyo)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

4.4 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah sebagai ukuran keberhasilan utama yang secara mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo 2025-2029. Hal ini nantinya untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Adimulyo sebagaimana pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Adimulyo	Indeks	91,10	91,20	91,30	91,40	91,50	91,60	
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Adimulyo	Indeks	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Adimulyo, 2025

Sedangkan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Adimulyo selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Bupati dan Wakil Bupati. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya”.

Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Adimulyo berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Adimulyo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan dalam penyesuaian kebijakan pembangunan daerah pada periode selanjutnya. Dengan mekanisme ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Adimulyo dapat berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Adimulyo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur kecamatan, dukungan anggaran, serta sinergitas dengan Pemerintah Daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Adimulyo.

Kebumen, 19 September 2025
Camat Adimulyo
Kabupaten Kebumen



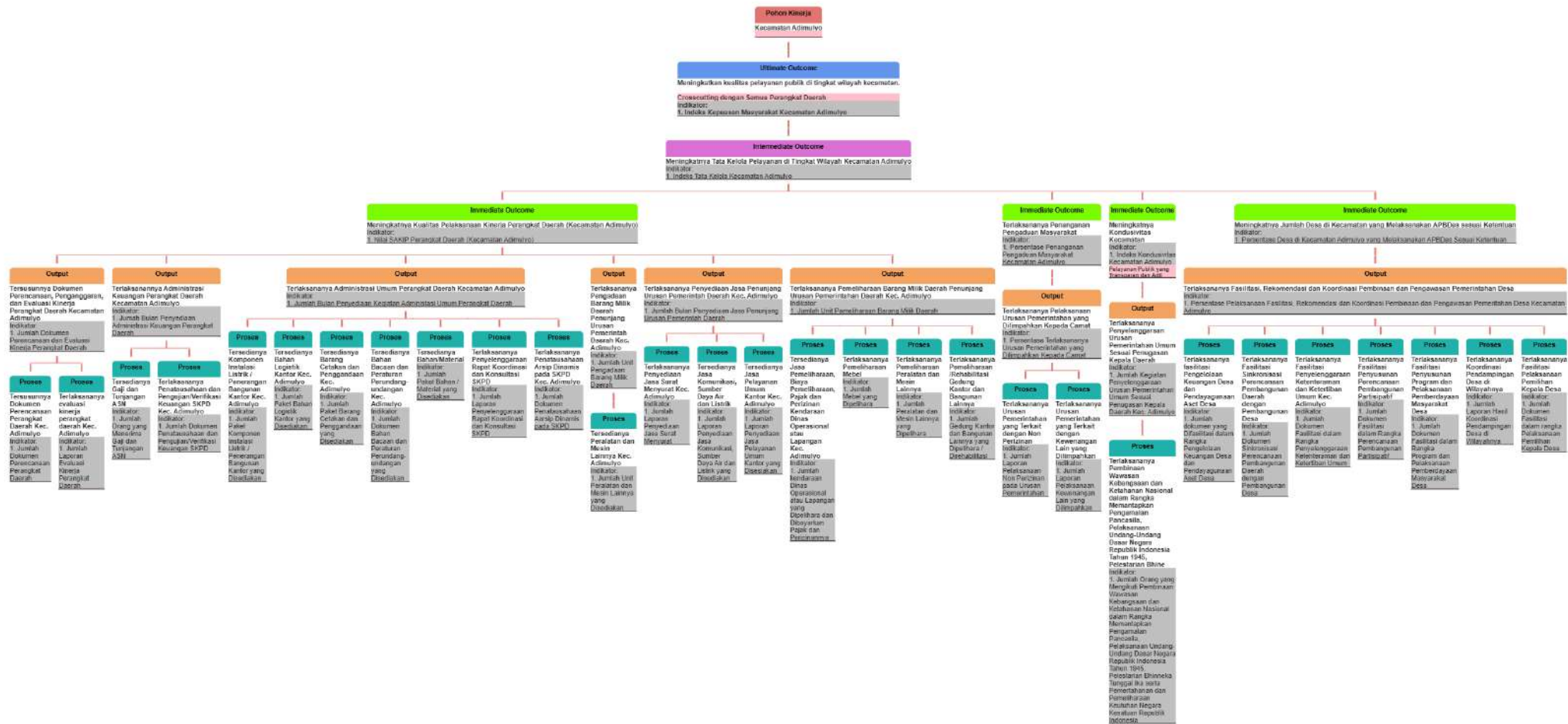
Drs. Budiono, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19691016 199001 1 001

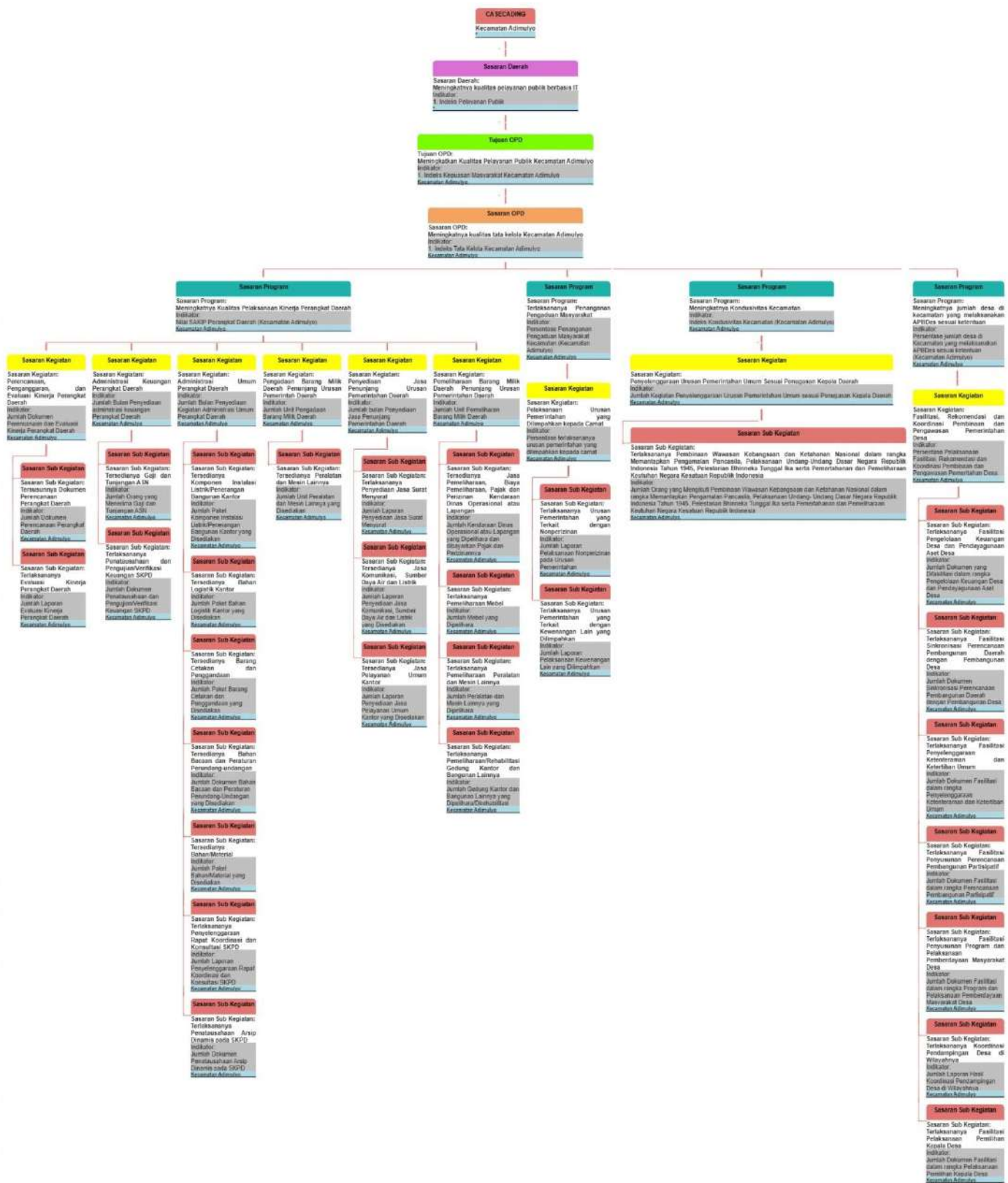
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Hantari Mattadewi	

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
2. *Cascading*
3. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Pendanaan
4. Rumus Perhitungan Indikator
5. SK Penyusunan Rencana Strategis
6. Pelaksanaan Forum Renstra

Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 2025-2029





3. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.655.013.122		2.731.243.085		2.823.227.407		2.929.066.588		3.002.884.194		
7.01	KECAMATAN				2.655.013.122		2.731.243.085		2.823.227.407		2.929.066.588		3.002.884.194		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.489.574.122			2.557.902.085		2.649.386.407		2.748.649.588		2.821.484.194	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan:Nilai)	71,85	71,86	71,90		72,00		72,51		73,76		75,00		SEKRETARIS CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.000.000			13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	24	24	14		14		14		17		14		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.500.000			6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	6		6		6		8		6		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.500.000			6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	13	13	8		8		8		8		8		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.276.949.276			2.342.807.755		2.433.433.086		2.527.263.296		2.596.053.210	
	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administarsi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.261.949.276			2.329.807.755		2.419.433.086		2.513.263.296		2.581.553.210	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	17	17		17		17		17		17		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					15.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000		14.500.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13	8		8		8		8		8		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.673.389		30.656.850		34.308.639		37.291.532		37.661.082	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.200.000		2.200.000		2.500.000		3.500.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.400.000		14.400.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1.507.389		1.490.850		1.608.639		1.791.532		1.661.082	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.440.000		1.440.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					4.800.000		4.800.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.200.000		3.200.000		3.600.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.126.000		3.126.000		3.200.000		3.600.000		3.600.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					38.600.000		38.600.000		39.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	9	4	6		6		6		6		6		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					38.600.000		38.600.000		39.000.000		40.000.000		40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4	6		6		6		6		6		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.916.457		75.662.480		77.668.682		78.974.760		79.649.902	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat					1.500.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					21.820.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		24.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					49.596.457		52.012.480		53.018.682		53.324.760		53.999.902	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.435.000		57.175.000		51.976.000		52.120.000		55.120.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	28	29	40		28		38		28		38		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35.433.000		35.675.000		36.976.000		38.000.000		40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	14		14		14		14		14		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					2.000.000		0		1.000.000		0		1.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	12		0		10		0		10		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.000.000		8.500.000		4.000.000		4.120.000		4.120.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					12.000.000		13.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					23.039.000		24.191.000		24.191.000		24.917.000		25.400.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					23.039.000		24.191.000		24.191.000		24.917.000		25.400.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. (Dengan Satuan: Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					23.039.000		24.191.000		24.191.000		24.917.000		25.400.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50		50		50		50		50		Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					131.400.000		137.650.000		137.650.000		143.000.000		143.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Adimulyo) (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					131.400.000		137.650.000		137.650.000		143.000.000		143.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					30.000.000		30.000.000		31.500.000		32.500.000		32.500.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	5		5		5		5		5		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		6.250.000		0		0		0	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		21		0		0		0		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					12.700.000		12.700.000		13.300.000		14.000.000		14.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.000.000		13.000.000		13.650.000		14.500.000		14.500.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					30.500.000		30.500.000		32.000.000		33.000.000		33.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					35.000.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000		37.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.200.000		10.200.000		11.200.000		12.000.000		12.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL:		2.655.013.122		2.731.243.085		2.823.227.407		2.929.066.588		3.002.884.194		

4. Rumus Perhitungan Indikator

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL						
			SASARAN PROGRAM									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis IT											
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Adimulyo		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Adimulyo	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><td>Nilai Interval Konversi</td><td>Mutu Pelayanan</td><td>Kinerja Unit Pelayanan</td></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan										
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik										

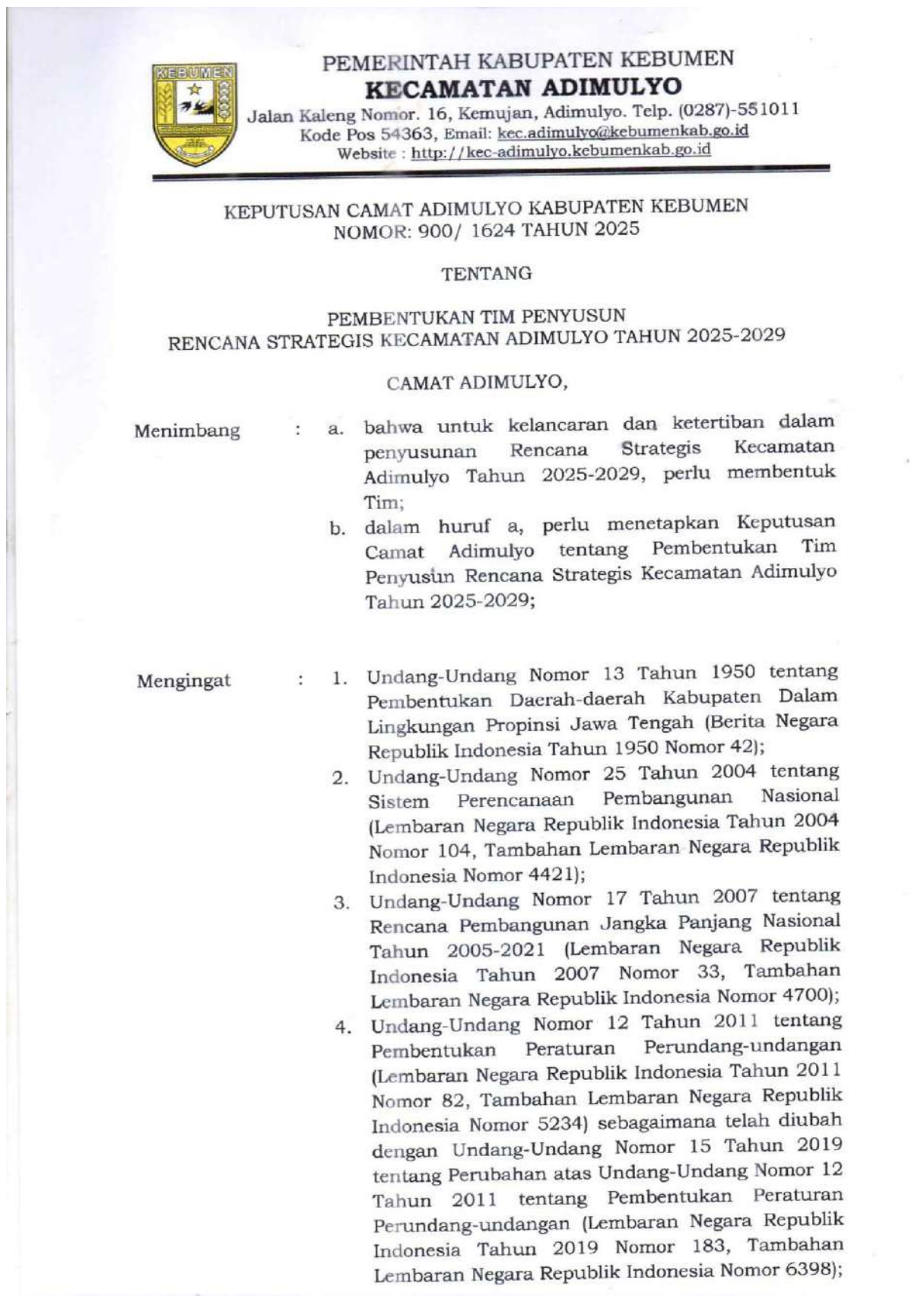
					<table><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik oleh Kecamatan Adimulyo Penanggung Jawab : Camat Adimulyo	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
76,61 – 88,30	B	Baik													
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik													
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik													
1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Adimulyo	Indeks Tata Kelola Kecamatan Adimulyo	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) dikali 100 % 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100%	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan indeks yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.									

					2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Evaluasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi, Laporan Fasilitasi Penyusunan APBDes, dan Laporan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Desa. Penanggung Jawab : Camat Adimulyo										
1.1.1.1			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo)	Dihitung berdasarkan komponen : 1) Perencanaan kinerja (bobot 30%) 2) Pengukuran kinerja (bobot 25%) 3) Pelaporan kinerja (bobot 15%) 4) Evaluasi kinerja (bobot 10%) 5) Capaian kinerja (bobot 20%) Total Skor = $\sum$ (Nilai Komponen x Bobot) Interpretasi Nilai SAKIP sesuai PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 <table><tr><td>Kategori</td><td>Skor</td><td>Interpretasi</td></tr><tr><td>AA</td><td>> 90 -100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>> 80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr></table>	Kategori	Skor	Interpretasi	AA	> 90 -100	Sangat Memuaskan	A	> 80 - 90	Memuaskan	Nilai SAKIP Kecamatan adalah skor akhir yang diperoleh dari hasil evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan. Nilai ini mencerminkan sejauh mana Kecamatan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan terhadap <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang
Kategori	Skor	Interpretasi													
AA	> 90 -100	Sangat Memuaskan													
A	> 80 - 90	Memuaskan													

					<table><tr><td>BB</td><td>> 70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>> 60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>C</td><td>> 50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>CC</td><td>> 30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table> Sumber Data: e-sakip (semarak.kebumenkab.go.id) Penanggung Jawab: Sekretaris Camat	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	B	> 60 - 70	Baik	C	> 50 - 60	Cukup	CC	> 30 - 50	Kurang	D	0 - 30	Sangat Kurang	dihasilkan bagi masyarakat di wilayahnya.
BB	> 70 - 80	Sangat Baik																			
B	> 60 - 70	Baik																			
C	> 50 - 60	Cukup																			
CC	> 30 - 50	Kurang																			
D	0 - 30	Sangat Kurang																			
1.1.1.2			Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)	$P = \left(\frac{\sum \text{Pengaduan yang Diselesaikan}}{\sum \text{Total Pengaduan yang Masuk}} \right) \times 100\%$ (Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani / Jumlah pengaduan masyarakat) x 100% Sumber Data: Laporan Pengaduan Masyarakat Penanggung Jawab: Camat Adimulyo	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti / diselesaikan secara tuntas sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dibandingkan dengan total jumlah seluruh pengaduan yang masuk ke Kecamatan dalam satu periode tahun anggaran.															
1.1.1.3			Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)	$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Kasus Tertangani}}{\sum \text{Total Gangguan yang Masuk}} \times 100$ (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100%	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah indeks yang menggambarkan tingkat stabilitas keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial di wilayah kecamatan. Nilai ini diukur berdasarkan ketiadaan atau															

					Sumber Data: Laporan Gangguan Ketertiban Penanggung Jawab: Camat Adimulyo	minimalnya kejadian konflik sosial, unjuk rasa anarkis, tindak kriminalitas, serta gangguan ketentraman masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan Adimulyo)	$P = \left(\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan}}{\text{Total Seluruh Desa di Kecamatan}} \right) \times 100\%$ (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan / Jumlah desa di kecamatan) x 100% Sumber Data: Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBDes Penanggung Jawab: Camat Adimulyo	Persentase jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan adalah ukuran tingkat kepatuhan pemerintah desa di wilayah kecamatan dalam siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBDes yang tepat waktu dan taat asas sesuai peraturan perundang-undangan (Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

5. SK Penyusunan Renstra



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cdra Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini |
| KEDUA | : | Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ; b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Tahun 2025-2029. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Camat Adimulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 1 September 2025



CAMAT ADIMULYO

BUDHONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR: 900/ 1624 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
ADIMULYO TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ADIMULYO TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Adimulyo	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Adimulyo	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Adimulyo	Ketua Kelompok Kerja	
4.	Perencana Ahli Pertama	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Adimulyo	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Adimulyo	Anggota	
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Adimulyo	Anggota	
8.	9 (sembilan) orang Staff pada Kecamatan Adimulyo	Anggota	1. Agus Sugiharto, S. Pd. 2. Dwi Cahya Husnawati, A. Md. Ak. 3. Rasiman, A. Md. 4. Sukanto 5. Heri Purwanto 6. Eva Dwi Listyani, S. AP. 7. Ahmad Sodirun 8. Sri Budiwarni 9. Tri Widiyantoro



CAMAT ADIMULYO

BUDIONO

6. Pelaksanaan Forum Renstra





RENSTRA

KECAMATAN ADIMULYO

2025 – 2029

(0287) 551011 / WA 082220157023
JALAN KALENG NO 16, KEMUJAN
KECAMATAN ADIMULYO, KEBUMEN
kec.adimulyo@kebumenkab.go.id